Halaman

Penegak Hukum Diminta Turun Tangan

Dari Halaman 1

berfungsi. Hujan sedikit saja, Medan tetap banjir. Artinya proyek itu gagal total," tegas Azmi, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, proyek tersebut diduga hanya menjadi "bancakan" para oknum, karena dikerjakan tanpa perencanaan dan pengawasan yang matang. "Ratusan miliar uang rakyat seolah habis sia-sia untuk proyek yang hanya jadi ajang pemborosan dan bancakan," ujarnya.

KAMAK pun mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ke-

jaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), serta Polda Sumut agar segera mengusut dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek kolam retensi tersebut.

Kronologis Singkat

Pembangunan kolam retensi di Medan mulai dikerjakan sejak tahun 2018 oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II) bersama Pemerintah Kota Medan, dengan tujuan menekan genangan air dan banjir musiman.

Kolam Retensi USU dibangun pertama kali dengan nilai proyek sekitar Rp48 miliar, diharapkan menampung limpasan air dari kawasan Padang Bulan dan

Kolam Retensi Selayang menyusul pada tahun 2020

dengan anggaran sekitar Rp52 miliar, untuk menampung aliran dari wilayah Tuntungan dan Pancur Batu.

Kolam Retensi Martubung, yang disebut paling besar, dibangun tahun 2021-2022 dengan nilai proyek lebih dari Rp80 miliar, diperuntukkan bagi kawasan Timur Medan.

Namun, sejak rampung, ketiganya dinilai tidak berfungsi optimal. Banjir masih kerap melanda sejumlah wilayah, terutama di sekitar USU, Selayang, dan Martubung.

"Sudah tujuh tahun sejak dimulai, tapi hasilnya nol besar. Maka kami minta KPK, Kejagung, Kejatisu, dan Polda Sumut segera menyelidiki ke mana sebenarnya aliran dana besar proyek itu," tegas Azmi.(A-10)

Pemko Didesak Buat Kolam Retensi

Dari Halaman 1

ian masalah itu, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi (SDABMBK) dan Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan didesak supaya segera melakukan kajian pembuatan kolam retensi atasi banjir di Medan Tembung.

Hal itu ditegaskan H Zulkarnaen, Senin (13/10/2025), menyikapi masalah banjir di Jalan

Letda Sujono Medan Tembung yang sudah lama belum terselesaikan. Apalagi, saat ini terjadi musim hujan, badan jalan terendam banjir yang berdampak kemacetan lalu lintas.

"Lahan untuk pembuatan kolam retensi sudah ada, tinggal menunggu kajian Dinas SDABMBK dan Perkimcikataru melakukan kajian agar pembangunan segera dimulai," tegas Zulkarnaen asal politis

Sebagaimana diketahui, salah satu solusi mengantisipasi banjir di Jl. Letda Sujono Tembung harus

dilakukan pembuatan kolam retensi penampungan air sementara dan berlanjut pompa air. Sebelumnya, dari rapat rapat dan pertemuan antar OPD dan stakholder yang digagas Zulkarnaen sudah menemukan titik terang yakni pendirian kolam retensi.

Keseriusan Zulkarnaen menyelesaikan kondisi banjir, macet dan maraknya tindak kejahatan di pintu Tol Bandar karena sebelumnya banyak keluhan masyarakat. Setelah itu Zulkarnaen berkomitmen siap memfasilitasi kordinasi dengan pihak.l manapun termasuk Pemkab Deli Serdang.(A-10)

Kejagung Tolak Praperadilan Nadiem

Dari Halaman 1

"Menegaskan lah bahwa penyidikan yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya dengan adanya putusan ini ya, penetapan tersangka dan penahanan Pak Nadiem telah sah menurut hukum acara pidana ya," kata Anang saat dihubungi, Senin (13/10).

Disampaikan Anang, selanjutnya tim penyidik akan fokus melanjutkan penyidikan dan menuntaskan proses hukum atas perkara

"Dan selanjutnya penyidik akan melanjutkan atau menuntaskan penyidikannya. Tentunya dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, ya," tutur

Sebelumnya, hakim tunggal PN Jaksel

memutuskan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Mendibud Ristek Nadiem Makarim.

Hakim menilai proses hukum Kejaksaan Agung yang menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan menahannya adalah sah menurut hukum.

"Mengadili: satu, menolak Praperadilan pemohon. Dua, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil." ujar hakim tunggal Ketut Darpawan membacakan keputusan disusul ketukan palu darinya.

Kejagung sebelumnya menetapkan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022.

Selama periode itu, Kemendikbud mengadakan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah-sekolah di Indonesia khususnya di daerah 3T dengan total

anggaran mencapai Rp9,3 triliun.

Pengadaan laptop ini dipilih menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook meskipun memiliki banyak kelemahan dan tidak efektif untuk sarana pembelajaran pada daerah 3T karena belum memiliki akses internet.

Selain Nadiem, Kejagung juga menetapkan empat orang tersangka yakni Direktur SMP Kemendikbudristek 2020-2021, Mulyatsyah; Direktur SD Kemendikbudristek 2020-2021. Sri Wahyuningsih; Mantan stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan; dan Mantan Konsultan Teknologi pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.

Atas perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp1,98 triliun yang terdiri dari kerugian akibat Item Software (CDM) sebesar Rp480 miliar dan mark up harga laptop sebesar Rp1,5 triliun.(cnni/js)

Orang Tua Nadiem Patah Hati

Dari Halaman 1

yang menjalankan seluruh pekerjaannya, karirnya itu dengan prinsip-prinsip itu, " katanya kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/10).

Atika lantas menyinggung kontribusi Nadiem dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta kebijakan di bidang pendidikan.

"Seperti yang dilakukan pada waktu Gojek, dengan memberi pekerjaan kepada 4 juta pekerja dan kemudian dengan program-program pendidikannya yang dia anggap perlu untuk memajukan pendidikan bangsa ini," katanya.

Atika tidak memahami mengapa kasus hukum ini bisa terjadi. Mereka menilai situasi yang menimpa Nadiem merupakan bagian dari tantangan besar dalam perjalanan panjang memperjuangkan nilai-nilai kejujuran dan kemaiuan bangsa.

"Kita sedih dan enggak mengerti, mengapa ini semua terjadi, bisa terjadi. Tapi setelah mengatakan itu, ya udah, sekarang kita hadapi perjuangan ke depan yang pasti masih panjang.

Tapi saya tahu bahwa anak saya anak yang jujur," ujar Atika.

Lebih lanjut, Atika memastikan Nadiem akan tetap berjuang membuktikan integritasnya melalui jalur hukum yang berlaku.

"Dia akan berjuang dan dia akan mengungkapkan kejujurannya itu. Yang saya harapkan adalah para penegak hukum juga akan memegang prinsip yang sama untuk menegakkan kepastian hukum, menegakkan kebenaran, dan kejujuran untuk bangsa ini, bukan hanya untuk Nadiem," katanya.(cnni/js)

Lima Juta Buruh Ancam Mogok Damai Massal

Dari Halaman 1

sampai 10,5%. Bilamana tuntutan ini tidak dikabulkan, tapi pemerintah memutuskan sepihak melalui Menteri Ketenagakerjaan dan Menko Perekonomian, (maka) kami akan mengorganisir pemogokan secara besar-besaran di seluruh Indonesia.'

TOLAK MELALUI MOGOK

Said menegaskan, serikat buruh menolak jika keputusan kenaikan upah ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa mendengar aspirasi pekerja. "Kalau pemerintah hanya mendengar syarat Apindo, maka kami memutuskan buruh di KSP-PB yang jumlahnya jutaan itu akan melakukan pemogokan besar-besaran di seluruh Indonesia," sambungnya.

Hal tersebut disampaikannya sebagai respons atas pernyataan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (63), yang sempat menyebut kenaikan upah minimum 2026 telah ditetapkan sebesar

Said mengatakan, aksi mogok akan melibatkan buruh dari 72 organisasi yang tergabung dalam KSP-PB di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Said memperkirakan, aksi mogok nasional itu bisa melibatkan hingga 5 juta buruh dari sekitar 7.000 pabrik di berbagai daerah. "Ini kalau benar aksi besar-besaran bisa lima juta buruh turun ke jalan di 38 provinsi, lebih dari 300 kabupaten/ kota. Anda bisa bayangkan, tujuh ribu pabrik itu besar sekali di seluruh Indonesia," ungkap Said.

HAK MOGOK

Hak mogok, adalah hak dasar pekerja/buruh untuk melakukan aksi penghentian kerja secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan

Hak mogok diatur dalam UU Ketenagakerjaan (UU Nomor 13/2003) khususnya pada Pasal 137 hingga 145. Agar sah, pekerja wajib memberitahukan rencana mogok kerja secara tertulis kepada pengusaha dan instansi ketenagakerjaan minimal tujuh hari kerja sebelum pelaksanaan, dengan rincian waktu, tempat, dan alasan mogok, serta tanda tangan ketua dan sekretaris serikat

pekerja. Selama mogok kerja yang sah, pekerja tetap berhak mendapatkan upah dan tidak dapat dipindahtugaskan atau dikenakan sanksi -menurut laman google.

DIDAHULUI DEMO DAMAI Menurut Said, aksi mogok didahului gelombang

demonstrasi di sejumlah daerah. Beberapa aksi sudah mulai digelar di Serang (Banten) dan Bandung (Jawa Barat), dan akan berlanjut di berbagai kota industri lainnya.

"Kapan waktunya nanti akan kami umumkan. Pemogokan ini didahului aksi-aksi di daerah yang

bergelombang," kata dia. Dia menegaskan, aksi buruh menuntut kenaikan upah minimum 2026 akan digelar secara tertib dan

damai, tanpa kekerasan. 'Saya menyerukan aksi damai, anti-kekerasan, tidak boleh anarkis, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, jangan merusak apalagi memba-

kar," ujar Said. "Bagi kelompok di luar buruh yang melakukan aksi anarkis, kami tidak bertanggung jawab. Aksi kami terorganisir, damai, tertib, hanya memperjuangkan kenaikan upah minimum 8,5 sampai 10,5%," pungkasnya.

AIRLANGGA

Diberitakan sebelumnya, Menko Airlangga Hartarto, mengatakan, kenaikan UMP 2026 telah ditetapkan naik sebesar 6,5%.

Dia bilang, kenaikan UMP 2026 itu sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mula-mula, Airlangga menyinggung berbagai kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, salah satunya yang bisa menekan angka pengangguran hingga 4,76% sejak 1998.

"Dan untuk daya beli para pekerja, kenaikan upah minimum provinsi di tahun 2026 sudah ditetapkan Bapak Presiden sebesar 6,5%," ujar Airlangga dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis 9/10.

Saat memberikan paparannya, Airlangga menampilkan slide paparan berjudul "Capaian Sosial dan Ketenagakerjaan." Dalam slide tertulis tingkat pengangguran sebesar 4,76%, angka terendah seiak 1998. Kemudian tertulis pula UMP 2026 sebesar 6,5%. Di dalam presentasi tersebut diung-

kap juga, jumlah orang bekerja pada Februari 2025 sebanyak 145,77 juta. Lalu tingkat kemiskinan sebesar 8,47%, dan ada 3,46 juta UMKM/petani/ nelayan yang mendapat akses KUR (kredit usaha rakyat) selama periode Januari sampai September 2025. Sebagai informasi, sampai saat ini pemerintah belum menetapkan besaran kenaikan UMP

UMP yang saat ini berlaku yakni UMP 2025 berdasarkan Permenaker Nomor 16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Saat dikonfirmasi usai menyampaikan paparannya, Menko Airlangga menyatakan kenaikan UMP 6,5% terjadi pada 2024 untuk ketentuan UMP 2025. "(Itu) Tahun kemarin," kata Airlangga. Sementara itu, untuk UMP 2026, menurut Airlangga, saat ini masih dalam proses pembahasan.

"UMP tahun depan kan sedang dalam proses," tuturnya.

YASSIERLI

Senada dengan Airlangga, Menaker Yassierli (59), mencatat pembahasan terkait kenaikan UMP 2026 masih terus berproses. Dia mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan kajian mendalam dan dialog sosial dengan berbagai pihak sebelum menetapkan besaran kenaikan upah tersebut. "UMP kan sampaikan sedang proses ya, tunggu aja. Prosesnya kita sedang mengembangkan konsep, ada kajian ini ya. Kemudian juga sudah ada sosial dialog, ya mendengar aspirasi dari buruh, dari pengusaha," ujar Yassierli usai gelaran Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Jakarta, Sabtu 11/10. Dewan Pengupahan Nasional saat ini, juga dilaporkan mulai melakukan serangkaian rapat membahas formula dan pertimbangan dalam penetapan UMP 2026.

"Kemudian Dewan Pengupahan Nasional juga sudah mulai melakukan rapat-rapat. Tunggu aja, masih ada waktu kok," paparnya. Yassierli mengatakan, penentuan besaran UMP 2026 akan menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2024 lalu. Ia bilang, putusan MK menjadi hal utama yang akan direalisasikan dalam penghitungan upah pekerja untuk 2026. (kompas. com/google-cp).

Medan, Kota yang Ditakdirkan Banjir?

Dari Halaman 1

genangan. Sepatu bot dipakai, kamera beraksi, dan janji diucapkan. Katanya drainase akan dibenahi, kolam retensi akan ditambah. Tapi setelah air surut, tak ada yang berubah. Kolam retensi tinggal proyek di papan nama, dan drainase baru justru menambah masalah di titik lain. Kota ini hidup dalam pola yang berulang, bising di awal, diam di akhir.

Ironinya, di tengah banjir yang kian parah, pembangunan gedung bertingkat tak pernah berhenti. Apartemen baru tumbuh di pinggir sungai, perumahan mewah berdiri di lahan rawa. Izin terus mengalir tanpa kendali. Setiap meter tanah yang tertutup semen berarti satu kesempatan air kehilangan tempat bernaung. Dan setiap bangunan yang menutup jalur air adalah tiket bagi banjir berikutnya untuk datang lebih cepat.

Kalau kota ini punya ingatan, ia pasti menangis melihat nasib sungai-sungainya. Dulu, Sungai Deli mengalir jernih, memberi hidup bagi warga. Sekarang ia berubah jadi parit raksasa yang menampung limbah dan sampah. Di beberapa titik, lebar sungai tinggal separuh dari peta. Sementara pemerintah lebih sibuk memoles taman kota dan mengejar penghargaan, air diam-diam menunggu waktu untuk menagih kelalaian.

Maka, banjir di Medan bukan bencana tapi sebuah konsekuensi. Ia lahir dari kebijakan yang setengah hati dan pengawasan yang bisa dibeli. Dan selama pembangunan masih ditimbang dari siapa yang punya izin, bukan dari apa yang layak bagi lingkungan, kutukan bernama banjir ini akan tetap diwariskan. Dari wali kota ke wali kota berikutnya. Dari genangan ke genangan berikutnya. Dari kita, untuk anak cucu yang akan tetap menunggu air surut.(*)

Purbaya 'Ogah' Bayari

Dari Halaman 1

kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," ujar Purbaya usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

"Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," tegas sang Bendahara Negara. Danantara sebelumnya mengungkapkan dua opsi penyelesaian

utang proyek Whosh yang membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI).

Opsi tersebut meliputi penyertaan modal kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengklarifikasi bahwa pemerintah memang tidak berencana menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh.

Ia menyebut ada diskusi terkait solusi pembiayaan yang tak membebani kas negara.

Hal itu ditegaskan Prasetyo usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di rumah Presiden Prabowo Subianto, yakni di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu (12/10) malam. Kendati, ia menegaskan masalah Whoosh tidak dibahas dalam ratas tersebut.

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," kata Prasetyo selepas ratas, dikutip dari

Pemerintah, sambungnya, sebenarnya ingin kereta cepat berkembang, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung.

"Mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," sambungnya soal potensi pengembangan kereta cepat. (cnni/js)

9 Kios di Pasar VII

Dari Halaman 1

Meski tak menimbulkan korban jiwa, namun kebakaran itu mengakibatkan dua warga mengalami luka hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib.

Menurut warga sekitar, awalnya terlihat gumpalan asap hitam membumbung tinggi disusul kobaran api dari salah satu kios. Api dengan cepat menjalar ke bangunan kios yang berdinding tepas dan

Peristiwa itu membuat panik warga sekitar. Upaya pemadaman sempat dilakukan menggunakan alat dan air seadanya. Namun, api

"Apinya cepat kali membesar dan menjalar ke kios sebelahnya," sebut Juned (48), warga sekitar.

Sementara, Kasi Trantib Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Wasno menyebutkan, kebakaran terjadi pada pukul 10.00 WIB tadi mengakibatkan dua warga mengalami luka bakar. "Ada 2 orang (terluka), ibu Nur dan pak Rusli. Mereka pedagang

minyak dan sudah dievakuasi ke rumah sakit," sebut Wasno. Informasi lain menyebutkan, kebakaran itu disebabkan adanya pembeli atau penjual bensin eceran sedang memegang rokok ketika

melakukan pengisian. Api yang semula kecil menyambar tumpukan tabung gas elpiji yang tidak jauh dari lokasi. Kobaran api langsung membesar dan membakar

sejumlah kios lainnya. "Informasinya karena ada yang merokok saat pengisian bensin," katanya Sedangkan Manager Pusdalops-PB BPBD Kota Medan, Ahmad Untung Lubis menuturkan, kebakaran itu melanda 7 unit kios dengan persentase 60-70%. "Penyebab kebakaran dalam penyelidikan. Korban jiwa tidak ada," tandasnya. (mc/js)



Medan Banjir, Salah Siapa

Dari Halaman 1

jan. Proyek yang dimulai sejak 2018 oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS II) bersama Pemerintah Kota Medan ini menelan dana lebih dari Rp180 miliar. Namun, setelah tujuh tahun berlalu, banjir justru masih menjadi pemandangan rutin di titik-titik yang sama.

Kornas KAMAK, Azmi Hadly, bahkan menyebut proyek ini "gagal total" dan menduga adanya penyimpangan anggaran dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Ia menuding proyek tersebut tak lebih dari "bancakan" yang menguapkan uang rakyat tanpa hasil berarti. Desakan agar KPK, Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum turun tangan menjadi wajar mengingat besarnya dana publik yang terlibat.

Namun, menyalahkan kolam retensi secara tunggal juga tidak sepenuhnya tepat.

Dalam sistem pengendalian banjir modern, kolam retensi hanyalah satu komponen dari rangkaian sistem yang lebih besar: drainase kota, tata guna lahan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dan perilaku masyarakat. Jika saluran air tersumbat, daerah resapan di hulu berubah jadi beton, dan kolam tidak dirawat dengan baik, maka fungsi penampungan air otomatis menurun. Dengan kata lain, kegagalan ini bukan semata kegagalan teknologi, tetapi kegagalan tata kelola perkotaan.

Masalah banjir di Medan adalah masalah klasik yang kompleks. Pertama, tata ruang kota yang tidak disiplin membuat daerah resapan air terus berkurang. Kedua, sistem drainase kota yang berusia puluhan tahun sudah tidak mampu menampung peningkatan volume air akibat urbanisasi cepat. Ketiga, kolam retensi yang dibangun tidak diintegrasikan dengan sistem aliran air utama. Akibatnya, ketika hujan datang, air tidak mengalir menuju kolam sebagaimana dirancang, tetapi justru melimpas ke jalan dan permukiman warga.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan teknis dan koordinasi antarinstansi.

Pembangunan kolam retensi seharusnya didahului oleh kajian hidrologis yang matang dan pemetaan menyeluruh tentang arah aliran air. Sayangnya, praktik pembangunan di lapangan sering kali terjebak pada target fisik semata asal proyek selesai, tanpa memastikan apakah infrastruktur itu berfungsi sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, transparansi pengelolaan proyek publik juga masih minim. Masyarakat tidak tahu berapa sebenarnya kapasitas kolam retensi, berapa debit air yang bisa ditahan, dan bagaimana perawatannya setelah proyek selesai. Padahal, dengan dana ratusan miliar rupiah, publik berhak mendapatkan hasil yang terukur, bukan sekadar bangunan beton tanpa fungsi.

Karena itu, seruan KAMAK agar dilakukan audit menyeluruh patut didukung. Pemerintah daerah, BWSS II, dan lembaga pengawasan harus membuka data dan laporan teknis proyek secara transparan. Jika terbukti ada kelalaian atau penyimpangan, penegakan hukum harus berjalan tanpa kompromi. Tetapi ke depan, perbaikan sistemik jauh lebih penting mulai dari perencanaan yang berbasis data, pengawasan independen, hingga pelibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur lingkungan.

Kolam retensi seharusnya menjadi simbol solusi, bukan sumber kekecewaan baru. Banjir Medan adalah cermin bagaimana pembangunan fisik tanpa tata kelola yang bersih dan integratif hanya akan melahirkan proyek-proyek mahal yang tak menyelesaikan masalah. Hujan boleh datang, tapi air tidak semestinya jadi bencana jika pemerintah benar-benar belajar dari kesalahan dan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.